



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 27
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat/ke-	: Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan / Ke- 4
Dengan	: Direktur Eksekutif Semeru Institute (Dr. Asep Suryahadi) dan Innovator 4.0 (Daniel Oscar Baskoro)
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Senin, 29 Oktober 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Akurasi Data Kemiskinan; Permasalahan dan Perbaikan
Hadir	: ..... orang dari 26 orang Anggota 1. Daniel Oscar Baskoro (Innovator 4.0 Indonesia)

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan **INNOVATOR 4.0 INDONESIA** yang diwakili oleh Daniel Oscar Baskoro membahas “**Akurasi Data Kemiskinan: Permasalahan dan Perbaikan**” Dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. **INNOVATOR 4.0 INDONESIA** (Daniel Oscar Baskoro)
  - a. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat terpisah di masing-masing unit pelaksana verifikasi dan validasi data kemiskinan.
  - b. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan di lapangan banyak ditemukan ketidak selarasan koordinasi yang bersifat horisontal dan vertikal.
  - c. Setiap program pemerintah memiliki standar yang berbeda beda terkait standarisasi data kemiskinan.
  - d. Tidak adanya mekanisme secara otomatis dalam melakukan pembaharuan data terkait dengan kondisi sosial masyarakat secara cepat/up to date.
  - e. Pemerintah harus memiliki satu data kemiskinan yang dijadikan dasar untuk sasaran berbagai pelaksanaan program pemerintah.
  - f. Pemerintah harus memiliki satu standar data kemiskinan dari tingkat nasional hingga daerah dalam menentukan status, apakah sebuah keluarga tergolong tidak mampu atau tidak. Standar juga termasuk elemen-elemen data yang diakui dan diwajibkan untuk digunakan terkait pendataan kemiskinan.
  - g. Dibutuhkan integrasi sistem untuk pembaruan data kemiskinan yang bertujuan untuk mempermudah pengecekan akurasi dan keterbaruan sebuah data. Integrasi juga termasuk integrasi bantuan-bantuan sosial sehingga mempermudah untuk menjadi acuan apakah sebuah individu/keluarga layak mendapatkan bantuan sosial atau tidak.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 12.28 WIB

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI  
PANJA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN**

**KETUA**

**Ttd.**

**Dr. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si.**